

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIFITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG  
(Studi di AZKA BUANA HARTA Travel)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NIKKO MEYENDO ARISSA PUTRA PRATAMA**

**NIM. 135010107111029**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **EFEKTIVITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi Di AZKA BUANA HARTA Travel).**

**Identitas Penulis** :

a. Nama : Nikko Meyndo Arissa Putra Pratama

b. NIM : 135010107111029

**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara

**Jangka waktu penelitian** : 4 bulan

**Disetujui pada tanggal :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr.Tunggul Anshari S.N., SH.,MH.

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195905241986011001

NIP. 195907171986011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2)  
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi Di  
AZKA BUANA HARTA Travel).**

Identitas Penulis :

a. Nama : Nikko Meyndo Arissa Putra Pratama

b. NIM : 135010107111029

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Tunggul Anshari S.N., SH.,MH.

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195905241986011001

NIP. 195907171986011001

Mengetahui

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at,S.H.M.Si.

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196208051988021001

NIP. 196008101986011002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi di ABH Travel)**. Terima kasih sang mendalam juga peneliti sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini, baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala bimbingan dan masukan selama proses pengajuan judul skripsi sampai pada akhirnya judul ini diterima dan bisa diselesaikan;
3. Bapak Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;
4. Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis selama kegiatan penulisan skripsi ini



sejak awal hingga terselesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya;

5. Keluarga dan teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa dukungan materiil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini Peneliti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Ringkasan.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Jalan .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum .....	17
C. Tinjauan Umum Penumpang.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
1) Jenis Data .....	25
2) Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Populasi dan Sampel .....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Definisi Operasional.....	27

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum.....	29
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	29
2. Gambaran Umum Azka Buana Harta (ABH) Travel.....	34
3. Gambaran Umum Organisasi Angkutan Darat .....	36
B. Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang Di Azka Buana Harta (ABH) Travel .....	41
C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dapat Berjalan Efektif .....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR Gambar

Gambar 1.1. Peta Kota Malang .....	27
------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian .....	9
--	---



## RINGKASAN

Nikko Meyndo Arissa Putra Pratama, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, EFEKTIFITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi di ABH Travel), Nikko Meyndo Arissa Putra Pratama, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH., MH., Agus Yulianto, SH.MH.

Penelitian ini membahas ketidak sesuaian antara ketentuan Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (das sollen) dan tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel (das sein). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait efektifitas Pasal 166 ayat (1) dan ayar (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis, *kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis untuk menganalisis permasalahan mengenai* efektifitas Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ masih belum dapat dijalankan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor utama untuk menilai keefektifan suatu aturan hukum tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik, yaitu faktor penegak hukum dan faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Hambatan yang dialami ABH Travel adalah Organisasi angkatan darat (organda) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel, ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 ayat (2) UULLAJ, adanya anggapan dari Pihak ABH Travel bahwa klaim asuransi akan tetap dapat dilakukan walaupun tiket penumpang yang disediakan tidak sesuai dengan standart Pasal 166 ayat (2) UULLAJ, adanya pemikiran bahwa tidak masalah tiket yang diberikan tidak sesuai karena tidak pernah terjadi kompalin dari pihak organda ataupun pihak penumpang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel adalah melakukan perbaikan terhadap tiket penumpang yang selama ini dikeluarkan oleh pihak ABH Travel, melakukan koordinasi dengan pihak organda untuk melakukan perbaikan tiket penumpang, memperbaiki tiket penumpang ABH Travel agar dapat diajukan sebagai bukti yang valid dalam proses klaim asuransi, dan terus melayani penumpang dengan maksimal.

## SUMMARY

Nikko Meyndo Arissa Putra, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, *EFFECTIVENESS OF ARTICLE 166 ARTICLES (1) LETTERS A LAW OF NUMBER 22 YEAR 2009 REGARDING TRAFFIC AND TRANSPORT ROAD RELATED TO PASSENGER TICKETS (Study on ABH Travel)*, Nikko Meyndo Arissa Putra, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH., MH., Agus Yulianto, SH.MH.

*This study discusses what to do with Article 166 Paragraph (1) Letter A of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport (dlls sollen) and passenger tickets provided by ABH Travel (ds. Sein). Based on the above mentioned matter, the problem formulated in relation to the effectiveness of Article 166 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport related to passenger ticket in ABH Travel obstacles and efforts made in Article 166 paragraph (1) letter a Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation can be effective.*

*This research uses empirical juridical method, sociological juridical approach, then linked with existing problems, and analyzed by using descriptive analytical data analysis technique to analyze problem about effectiveness of Article 166 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport related to passenger ticket in ABH Travel obstacles and efforts made in Article 166 paragraph (1) letter a Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation can be effective.*

*The results showed that the provisions of Article 166 paragraph (1) UULLAJ still can not be effectively launched. This is because there are still 2 (two) of 3 (three) main factors to assess the effectiveness of a rule of law is still not applicable properly, namely law enforcement factors and living legal factors adopted in a community. The obstacle experienced by ABH Travel is that the army organization (organda) of Malang does not reprimand or check the completeness of ABH Travel, ABH Travel ignorance of passenger ticket provisions in Article 166 paragraph (2) UULLAJ, the assumption of the ABH Travel Party that insurance claims will still be made even though passenger tickets provided are not in accordance with the standard of Article 166 paragraph (2) UULLAJ, the thought that no ticket issue is given is not appropriate because it never happened kompalin from the organda or parties passenger. While the efforts undertaken by ABH Travel is to make improvements to passenger tickets that have been issued by the ABH Travel, coordinate with the organda to repair passenger tickets, fix ABH Travel passenger tickets to be submitted as valid evidence in the process of insurance claims, and continue to serve passengers with the maximum.*





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>1</sup>

Sekarang ini transportasi memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional. Kendaraan bermotor dalam perkembangannya setiap hari semakin menunjukkan angka yang meningkat hingga 5973 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) per tahun, sejalan dengan makin bertambah pesatnya kemajuan Lalu Lintas Jalan Raya, jumlah kendaraan yang ada semakin banyak aneka ragam jenisnya. Selain itu, transportasi juga memegang peranan dalam pembangunan. Salah satunya ikut menunjang peningkatan pendapatan nasional, dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja dan efisiensi bagi masyarakat. Peranan

---

<sup>1</sup> Rustian Kamaluddin, **Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 13.



tersebut pada akhirnya secara tidak langsung dapat mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan angkutan yang merupakan aspek strategis untuk mendukung sektor pengangkutan terkait dengan aturan (hukum) dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan mengatur hubungan hukum antara pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, yang mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penumpang.

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah perusahaan travel (selanjutnya disebut sebagai travel). Travel merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh sekelompok kecil atau sekelompok besar penumpang. Travel menyediakan sarana transportasi antara lokasi geografis yang relative jauh (antar kota, antar provinsi, maupun mancanegara) dengan menggunakan sarana berupa mobil, kapal, pesawat, atau lainnya.<sup>2</sup> Salah satu perusahaan travel yang terdapat di Kota Malang adalah ABH Travel, perusahaan penyedia jasa Travel yang tergabung dalam ABH Group. ABH Travel menyediakan layanan transportasi untuk sekelompok kecil penumpang antar kota (Malang sampai dengan

---

<sup>2</sup> Harmoni Travel Agent, **Pengertian Travel**, [harmonitravel.com/pengertian-travel](http://harmonitravel.com/pengertian-travel), diakses pada tanggal 2 Januari 2018 (Jam 13.35 WIB).

Madiun dan sebaliknya Madiun sampai dengan Malang) dengan menggunakan mobil.

Berdasarkan keterangan yang telah dijabarkan diatas dapat kita ketahui bahwa ABH Travel merupakan angkutan orang dan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum, dimana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). UULLAJ dibentuk sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan menggantikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat ini, termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan daerah dan pusat.

Dalam ketentuan penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, antara lain angkutan orang (penumpang)–angkutan barang, angkutan bus umum–angkutan pribadi, angkutan dalam trayek yang menggunakan bus–Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan lain sebagainya. Dengan itu agar uraian persoalan penyelenggaraan angkutan lebih menarik, kajian dalam penelitian ini akan di fokuskan pada pembahasan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.<sup>3</sup> Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Pasal 166 ayat (1) UULLAJ dijelaskan:

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.

Dokumen angkutan orang tersebut meliputi tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek, tanda pengenal bagasi, dan manifest.<sup>4</sup> Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang.<sup>5</sup>

Perusahaan angkutan umum orang wajib menyerahkan tiket penumpang, menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek, menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang, dan menyerahkan manifest kepada Pengemudi.<sup>6</sup> Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket

---

<sup>3</sup> Krisnadi Nasution, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum**, Jurnal Ilmu Hukum, 2012, Vol. 8, No. 16.

<sup>4</sup> Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>5</sup> Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup> Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.<sup>7</sup> Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.<sup>8</sup> Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.<sup>9</sup>

Pada penjelasan Pasal 166 Ayat (2) Huruf a dijelaskan bahwa tiket penumpang adalah dokumen yang paling sedikit memuat informasi mengenai nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan, dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.<sup>10</sup> Namun, tiket penumpang yang dikeluarkan oleh ABH Travel hanyalah memuat informasi mengenai nama penumpang, alamat penjemputan, alamat tujuan, waktu pemberangkatan, harga tiket, keberlakuan tiket, *charge area*, dan total pembayaran. Sehingga dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan antara *das sein* (tiket penumpang ABH Tavel) dan *das sollen* (ketentuan tiket penumpang yang terdapat dalam UULLAJ).

Pemberian tiket penumpang tersebut terkait adanya ganti kerugian (asuransi) yang diberikan kepada penumpang oleh pihak pengangkut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat transportasi berlangsung. Hal tersebut dikarenakan maraknya kecelakaan yang terjadi khususnya terhadap

---

<sup>7</sup> Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup> Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>10</sup> Keterangan Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

angkutan umum. Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.<sup>11</sup> Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.

Masalah yang sering muncul di dalam berlalu lintas salah satunya adalah masalah kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri, pengendara kendaraan bermotor sering lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. UULLAJ pada Pasal 229 Ayat 1 sampai 5 menyebutkan ada tiga jenis kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, dan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang dapat mengakibatkan orang lain (dalam hal ini penumpang) meninggal dunia atau luka berat.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Arah\\_lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Arah_lalu_lintas), **Arah Lalu Lintas**, diakses pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 14.34 wib

yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Berbicara tentang kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya disebabkan oleh empat faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, kompatibilitas antara manusia dan kendaraan (*human machine compatibility*) dan faktor lingkungan jalan. Dari keempat faktor tersebut, maka faktor manusia menjadi faktor yang paling sering dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik/pengelola mobil travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.<sup>12</sup> Arti perusahaan angkutan umum itu sendiri adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.<sup>13</sup> Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemilik/pengelola mobil travel sebagai perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa yakni perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.<sup>14</sup> Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas

---

<sup>12</sup> Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.<sup>15</sup>

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.<sup>16</sup> Mengacu pada kedua pasal di atas, apabila pengemudi mobil travel (sebagai orang yang dipekerjakan oleh pemilik/pengelola mobil travel) dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik/pengelola mobil travel tersebut ikut bertanggung jawab. Lebih daripada itu, jika penumpang mobil travel meninggal dunia atau luka, pemilik/pengelola mobil travel juga bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kecuali disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh penumpang.

Selain itu, pengemudi dan/atau pemilik/pengelola mobil travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.<sup>17</sup> Jadi, apabila kecelakaan mobil travel yang menelan korban jiwa tersebut disebabkan oleh

<sup>15</sup> Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>16</sup> Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup> Pasal 234 ayat (1) jo. Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

keadaan di luar kemampuan pengemudi, perilaku penumpang sendiri, dan/atau gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan, maka si pemilik/pengelola mobil travel tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tiket penumpang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 166 ayat (2) Huruf a UULLAJ sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait ganti rugi (asuransi) terhadap kerugian yang dialami oleh pihak penumpang karena kesalahan dari pihak pengangkut. Akan tetapi, tidak sesuainya tiket penumpang ABH Travel menimbulkan ketidak pastian terkait ganti rugi (asuransi) yang akan diberikan kepada penumpang oleh pihak ABH Travel apabila terjadi kerugian penumpang yang disebabkan oleh pihak ABH Travel dalam proses pengangkutan.

Perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk memberikan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat. Perbedaan Perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* tersebut jugalah yang melatar belakangi Penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **EFEKTIFITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi di ABH Travel).**

**Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian**

<b>Tahun</b>	<b>Nama dan Instansi Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Perbandingan</b>



2012	Rosinta Universitas Mulawarman	Tinjauan Hukum Terhadap Angkutan Taksi Gelap Di Bandara Sepinggian Di Balikpapan (Studi Di PT. Angkasa Pura, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dan Polri Resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggian)	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura, Dinas Perhubungan Balikpapan, dan Polri Resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggian dalam menertibkan taksi gelap di Bandara Sepinggian di Balikpapan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat berjalan dengan efektif?	Penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura, Dinas Perhubungan Balikpapan, dan Polri Resor Balikpapan Sektor Kawasan Bandara Sepinggian dalam menertibkan taksi gelap di Bandara Sepinggian di Balikpapan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji tentang kesesuaian antara tiket penumpang ABH Travel dengan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait klaim asuransi apabila terjadi kerugian terhadap penumpang.
2013	Syarif Muhammad	Perbuatan Melawan Hukum	Faktor apa yang	Penelitian ini mengkaji faktor-

	Redo Universitas Tanjungpura	Pemilik Kendaraan Pribadi Yang Dipergunakan Sebagai Angkutan Umum Taksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak	menyebabkan pemilik kendaraan pribadi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan umum taksi?	faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan pribadi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan umum taksi sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian antara tiket penumpang ABH Travel dengan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait klaim asuransi apabila terjadi kerugian terhadap penumpang.
--	------------------------------------	---	--	---

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel?

2. Bagaimanakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel, ORGANDA Kota Malang, dan Jasaraharja Kota Malang agar Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektifitas Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel;
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel, ORGANDA Kota Malang, dan Jasaraharja Kota Malang agar Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih berupa tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya para akademisi baik pengajar maupun mahasiswa terkait efektifitas Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang dan klaim asuransi bagi penumpang yang dirugikan.

#### **2. Manfaat Praktis**

**a. Bagi Penumpang ABH Travel**

Penelitian ini dapat digunakan oleh penumpang ABH Travel untuk lebih mengetahui tentang standart tiket penumpang yang seharusnya digunakan oleh ABH Travel sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait tiket penumpang.

**b. Bagi ABH Travel**

Penelitian ini dapat digunakan oleh ABH Travel sebagai acuan yang benar terkait standart tiket penumpang yang seharusnya digunakan oleh perusahaan travel antar kota/ antar provinsi sesuai dengan ketentuan pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait tiket penumpang.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul **EFEKTIFITAS PASAL 166 AYAT (1) DAN AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT TIKET PENUMPANG (Studi di ABH Travel)**. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian yang dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang (Studi Di Abh Travel).

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang (Studi Di Abh Travel).

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Jalan

Dalam suatu kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu terkait dengan pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur.<sup>35</sup> Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruh, akibat, dan kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.<sup>36</sup> Menurut Soerjono Soekanto, suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila:<sup>37</sup>

1. Telah mencapai pada suatu tujuan yang dikehendaki, terutama pada pembentukan hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Hukum dapat dikatakan efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakai dan/atau diharapkan oleh hukum itu sendiri.

Menurut Hasan Soleh pengertian efektivitas adalah keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya efek atau akibat yang dikehendakai seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud

<sup>35</sup> Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369.

<sup>36</sup> W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 89.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 99.

tertentu yang dikehendaknya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat hukum atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.<sup>38</sup> efektivitas adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>39</sup> Menurut Soejono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana telah dikutip oleh Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>40</sup>

1. Sosiologis, bahwa hukum itu benar adanya berlaku dan diapatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat.
2. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dicita-citakan dan/atau dikehendaki oleh adanya suatu peraturan-peraturan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Yuridis, mengacu pada anggapan yang telah disampaikan oleh Hans K dan W. Zewenbergen, yang berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>41</sup>

#### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan penegak hukum, dalam penelitian ini yang dimaksud penegak hukum adalah organisasi angkatan darat (organda) Kota Malang.

<sup>38</sup> Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 24.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Penerbit Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

<sup>41</sup> Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 47.



## 2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan hukum, yang dimaksud dengan substansi hukum dalam penelitian ini adalah Pasal 166 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

## 3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat suatu kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitas tersebut.

# B. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum

## 1. Tinjauan Umum Pengangkut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ‘pengangkut’ adalah “(1) orang yang mengangkut, (2) alat (kapal, mobil, dsb) untuk mengangkut.”<sup>42</sup> Pengertian nomor (1) secara terminologi berarti pihak penyelenggara pengangkutan, sedangkan pengertian nomor (2) berarti sebagai sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan, sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan. Penyelenggaraan pengangkutan adalah proses kegiatan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.<sup>43</sup> Pengangkut sebagai pihak penyelenggara pengangkutan bertujuan untuk

<sup>42</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan**, badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/, Diakses tanggal 1 Maret 2015.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.93.



membantu memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan orang dan/atau barang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau jumlah yang banyak, begitu pula dikatakan efisien karena perpindahan tersebut menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh.

Pengangkut memiliki arti yang luas yaitu tidak hanya terbatas atau dipertanggung jawabkan kepada crew saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang melaksanakan angkutan penumpang atau barang. Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan tersebut. Berangkat dari pengertian tersebut pengangkutan dapat dilakukan sendiri oleh pihak pengangkut, atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengangkut. Dalam hal ini, pihak pengangkut sebagaimana pengertian di atas dalam keberlakuannya bukan hanya dilakukan oleh orang semata, namun badan usaha yang memiliki wewenang mengadakan perjanjian pengangkutan, berhak menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang, dimana pihak pengangkut ini diwajibkan untuk memikul beban resiko tentang keselamatan penumpang dan atau barang-barang yang diangkut serta bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam kegiatan pengangkutan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Made Puri Adnyani Sangging, **Hukum Pengangkutan**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 1984, hlm.5.

Secara umum, dalam pengangkutan orang dan/atau barang di darat, laut maupun udara dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta nasional, koperasi, dan perorangan warga negara Indonesia.<sup>45</sup> Dalam keberlakuannya pihak-pihak yang bertindak sebagai pengangkut sebagaimana dimaksud di atas lumrahnya berbentuk badan usaha seperti: (Perusahaan Persekutuan badan hukum, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Persekutuan bukan badan hukum dan Perusahaan Perseorangan, “sangat sedikit pengangkut yang diselenggarakan oleh orang perseorangan bukan badan usaha.”<sup>46</sup> Hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi keberlangsungan kegiatan usaha pengangkutan tersebut.”<sup>46</sup> Pasal 36 KM No.35 Tahun 2003 jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 ditegaskan untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);

---

<sup>45</sup> Sution Usman Adji, *op.cit*, hlm.86.

<sup>46</sup> Sution Usman Adji, *op.cit*, hlm.89.

- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pengangkut yang tidak memiliki perusahaan pengangkutan, tetapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerjaan pengangkutan. Pengangkut yang menjalankan pekerjaan pengangkutan hanya terdapat pada pengangkutan darat melalui jalan raya. Ia tidak diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, tetapi harus memperoleh izin operasi (izin trayek). Dilihat dari makna syarat yang dimaksudkan di atas supaya pengangkut atau pihak penyelenggara pengangkutan mampu untuk melancarkan pengangkutan umum dengan teratur dan aman bagi penumpang dan/atau barang angkutan.

## **2. Tinjauan Umum Penumpang**

Penumpang angkutan umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana yang dimaksud bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal laut, ataupun pesawat terbang tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam alat pengangkutan, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Penumpang (passanger) adalah pihak yang berhak mendapatkan

pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Ada beberapa ciri penumpang orang yang berstatus pihak dalam perjanjian pengangkutan, membayar biaya angkutan dan pemegang dokumen angkutan.<sup>47</sup>

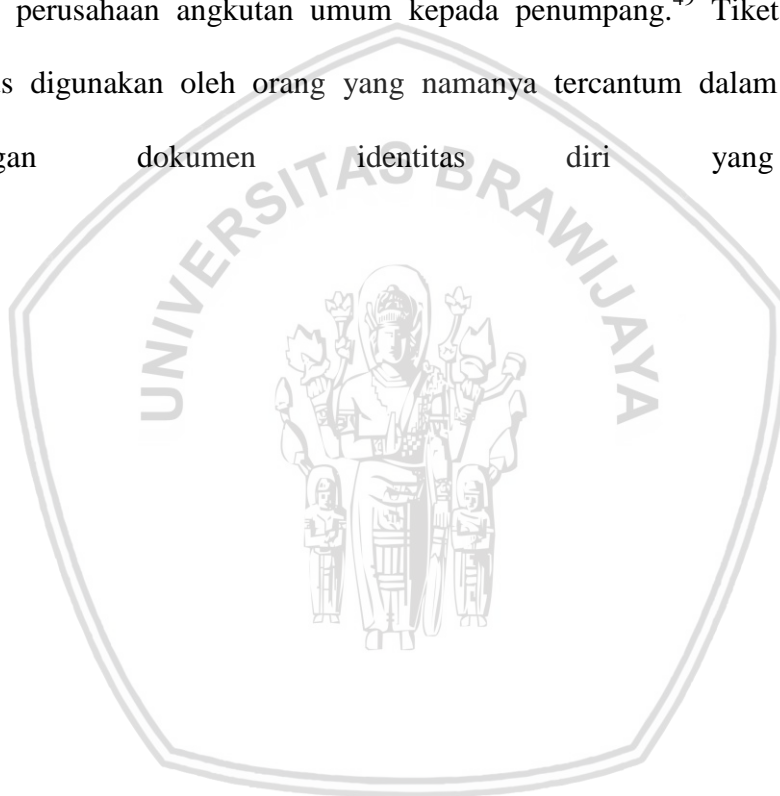
Menurut Yoeti pengertian penumpang adalah pembeli produk dan jasa pada suatu perusahaan adalah pelanggan perusahaan barang dan jasa mereka dapat berupa seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut, penumpang angkutan umum dapat di maknai seseorang (individu) dan/atau satu (kelompok) yang menggunakan alat transportasi umum untuk suatu perjalanan tertentu yang didasari atas suatu perjanjian sebelumnya, dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan tersebut.

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.51.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tiket Penumpang

Tiket Penumpang adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan; dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.<sup>48</sup> Tiket penumpang wajib diserahkan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang.<sup>49</sup> Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.<sup>50</sup>



<sup>48</sup> Pasal 166 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>49</sup> Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>50</sup> Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang mengkaitkan langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum terhadap masyarakat sebagai obyek pengaturannya. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diarpkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>67</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena Peneliti akan mengkaji implementasi Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dengan cara mengkaitkan langsung ketentuan tentang tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ (*das sollen*) tersebut dengan praktek sebenarnya yang ada di masyarakat (*das sein*).

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu empiris. Pendekatan yuridis-sosiologis akan melihat fenomena masyarakat yang telah diatur dalam suatu hukum. Yang dikaji dalam penelitian ini apakah hukum yang diterapkan di dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 2005. hlm 32.

undangan yang ada.<sup>68</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena untuk mengkaji implementasi Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ di ABH Travel dengan cara melihat fenomena masyarakat yang telah diatur oleh suatu hukum guna menelaah apakah hukum tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ.

### C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian hukum ini. Dengan pemilihan lokasi yang tepat diharapkan dapat memberikan informasi dan data-data yang valid untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini. Lokasi penelitian yang dipilih oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah ABH Travel. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena adanya suatu perbedaan antara tiket penumpang yang dimiliki ABG Travel dengan ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer yang menjadi sumber utama untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dan data sekunder sebagai penunjang dari data primer.

---

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**. Rienek Cipta. Jakarta. 2002. hlm 1.



### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang diperoleh penulis dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan pemilik ABH Travel, masyarakat sebagai penumpang ABH Travel, Kepala ORGANDA Kota Malang dan Kepala Jasaraharja Kota Malang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain – lain yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ. Data sekunder ini didapatkan dari Undang-Undang, Karya ilmiah, literatur, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum, media atau lainnya tiket penumpang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yuridis empiris dapat berupa pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain – lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain – lain). Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan pihak ABH Travel, masyarakat sebagai penumpang ABH Travel, ORGANDA Kota Malang, dan Jasaraharja Kota Malang.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari melalui peraturan perundang – undangan, literatur, jurnal, skripsi, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, serta kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pihak yang ada di kantor ABH Travel, masyarakat sebagai penumpang ABH Travel, pihak yang ada di Kantor ORGANDA Kota Malang, dan pihak yang berada di Kantor Jasaraharja Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.<sup>69</sup> Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yaitu pemilik ABH Travel, Bapak Adibya dan Ibu Andini sebagai penumbang ABH Travel yang pernah memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak ABH Travel, Kepala ORGANDA

---

<sup>69</sup> Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. CV Alfabeta. Bandung. 2011. hlm 122.

Kota Malang dan Kepala Jasaraharja Kota Malang. Penulis memilih sampel penelitian tersebut dikarenakan penulis berkeyakinan bahwa dengan jabatan, kewenangan dan pengalaman yang telah mereka alami, maka pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi yang valid sebagai data untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penyusunan data primer dan sekunder dalam penelitian ini, peneliti menyusunnya menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam hal ini terkait implementasi Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*) dalam hal ini Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan (*das sollen*) dalam hal ini penerapan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ oleh ABH Travel, dianalisa setelah itu ditarik kesimpulan.

## H. Definisi Operasional

1. Efektifitas adalah adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai;
2. Pengangkut adalah pihak yang berkewajiban untuk mengangkut penumpang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat;
3. Penumpang adalah pihak yang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan;
4. Tiket penumpang adalah adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah<sup>74</sup>

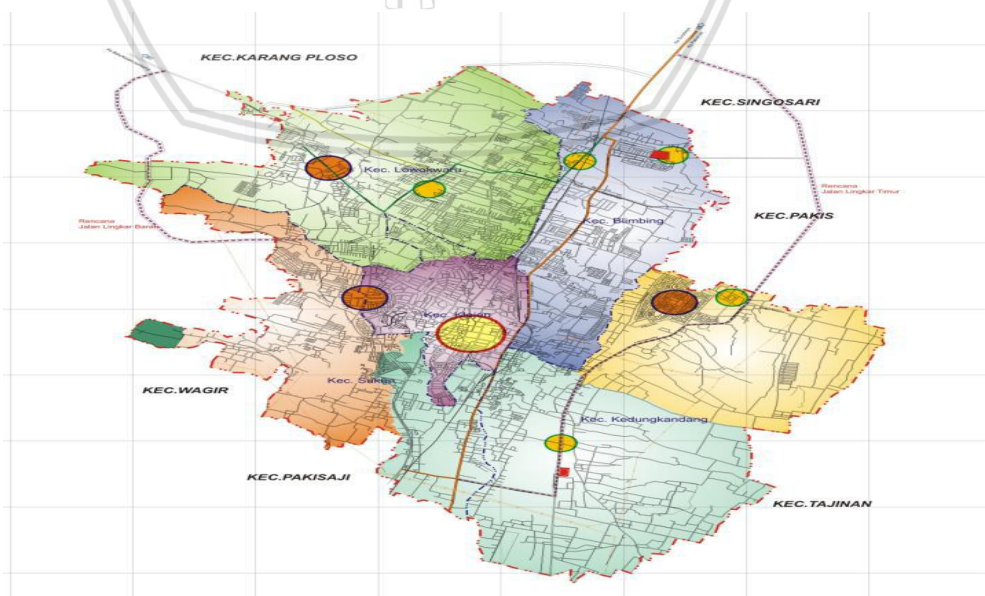
Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km<sup>2</sup>. Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang;
- 2) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- 3) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

<sup>74</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2013-2018 (*online*), [http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F\\_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf](http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf), diakses pada tanggal 05 Mei 2017.

- 4) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh). Dari 57 (lima puluh tujuh) kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 554 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan air laut. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Kondisi iklim Kota Malang relatif nyaman, dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai dengan 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum 37%.



Gambar 1. Peta Kota Malang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota  
Malang Tahun 2013-2018

**b. Visi Misi dan Tujuan<sup>75</sup>**

Pengertian mengenai Visi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat pada pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa *visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan*. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Malang harus dicapai dengan jangka periode selama 5 (lima) tahunan.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJM Daerah Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

**1) Visi Pemerintah Kota Malang**

<sup>75</sup> Pemerintah Kota Malang, Visi dan Misi (*online*), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017.



## **“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”**

### **2) Misi Pemerintah Kota Malang**

#### **a) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

#### **b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah Kota Malang**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan di Kota Malang.

#### **c) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial**



Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat Kota Malang yang rentan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan peran-peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender.

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kerukunan sosial masyarakat

**d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

**e) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Kota Malang**

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Kota Malang.

## 2. Gambaran Umum Azka Buana Harta (ABH) Travel

### a. Profil ABH Travel

ABH Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan yang meliputi perjalanan udara, darat dan laut. ABH Travel berdiri pada tanggal 30 Juni 2007 dengan nama Azka Buana Harta Travel. Dengan didukung oleh tenaga kami yang profesional, menjadikan perjalanan anda lebih menyenangkan dan anda akan merasa lebih nyaman. ABH Travel adalah perusahaan Jasa Pariwisata yang meliputi Travel, dan catering. ABH Travel berkomitmen mengutamakan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan Jasa Pariwisata yang menjadi unggulan kami untuk seluruh Perusahaan maupun pemerintahan.

Melalui profil perusahaan (*company profile*) ini kami siap memberikan “Pelayanan Sepenuh Hati”. Kelengkapan Informasi menjadi jaminan pelayanan kami dalam seluruh bidang jasa Pariwisata dalam dan luar negeri. Kelengkapan fasilitas operasional dan sumber daya yang terlatih serta profesional memberikan kepastian kepada tamu-tamu kami untuk melakukan aktivitas di bidang jasa Pariwisata bersama kami. Mutu kerja yang maksimal di tunjang dengan Pelayanan Sepenuh hati merupakan komitmen kami

ABH Travel dalam memberikan hasil kerja yang memuaskan kepada seluruh tamu kami. ABH Travel siap untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan sampai kegiatan terlaksana sehingga tercapai kepuasan yang berkesan.

**b. Visi dan Misi ABH Travel**

**1) Visi ABH Travel**

**Menjadi salah satu perusahaan jasa penyedia travel terbaik dan perusahaan yang mempunyai pelayanan serta produk yang lengkap khususnya dalam bidang transportasi publik.**

**2) Misi ABH Travel**

- a) Mengembangkan usaha pariwisata di Indonesia, khususnya Kota Malang, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo.
- b) Mendorong terciptanya transportasi yang maju di Indonesia;
- c) Memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan kepada semua pelanggan;
- d) Menciptakan lapangan kerja sebesar besarnya.
- e) Memberikan kesejahteraan kepada setiap anggota perusahaan, pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan ABH Travel;
- f) Berupaya menunjang pendapatan asli daerah;
- g) Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penumpang.

**3) Kebijakan Mutu ABH Travel**

- a) Terus meningkatkan dan menyempurnakan produk dan layanan kami khususnya dalam penyediaan jasa transportasi;
- b) Menyediakan produk jasa transportasi yang secara konsisten memenuhi harapan pelanggan;
- c) Memastikan personil dilatih secara profesional sesuai dengan standar perjalanan nasional dan pengembangan teknologi.
- d) Memastikan kepatuhan hukum dan peraturan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan publik.

#### **4) Produk dan Layanan ABH Travel**

- a) Penjualan tiket travel antar Kota Malang, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo;
- b) Penjualan tiket travel antar Kota Malang Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo dalam perjalanan malam hari;
- c) Catering dan Rumah Makan;
- d) Persewaan mobil dan sopir untuk wilayah sekitar Malang Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo.

### **3. Gambaran Umum Organisasi Angkutan Darat**

#### **a. Sejarah ORGANDA**

ORGANDA pertama kali dibentuk pada tanggal 30 Juni 1962 bertempat di Selecta (Malang), merupakan penggabungan organisasi-organisasi pengusaha angkutan yang ada. Organisasi ini

bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi. Organisasi ini dimulai pada era setelah perang kemerdekaan, dimana sebelum tahun 1950 (seribu Sembilan Ratus Lima Puluh), alat-alat angkutan umum praktis tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena hampir seluruh alat angkutan bermotor dikerahkan dalam rangka mendukung perjuangan merebut kemerdekaan. Pada awal 1950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) kegiatan perdagangan dan perekonomian di Kota-kota sudah mulai aktif dan secara bertahap angkutan kendaraan umum bermotor mulai tumbuh guna menunjang berbagai kegiatan di masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut, kehidupan politik ikut mempengaruhi kehidupan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dimana didalamnya terdapat banyak sekali organisasi angkutan umum dengan kendaraan bermotor yang merupakan kelompok-kelompok usaha jasa angkutan umum dengan orientasi yang berbeda beda. Diantaranya adalah Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis Seluruh Indonesia (IPPOSI), Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia (ORPENI), Federasi Gabungan Prahoto Indonesia (FEGAPRI), Gabungan Angkutan Darat Veteran Indonesia (GANDAVETRI), dan masih banyak lagi kelompok – kelompok kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan mempelajari keseluruhan azas dan tujuan organisasi-organisasi tersebut, seluruh

pimpinan organisasi-organisasi usaha jasa angkutan umum melebur organisasi tersebut dalam satu wadah organisasi yang disebut Organisasi Angkutan Darat, yang disingkat ORGANDA.

Pada perkembangannya, ORGANDA telah mampu menampilkan diri sebagai suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggotanya. Dan atas dasar pertimbangan tersebut Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata Nomor L. 25/1/18/1963 tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1963 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga) mengukuhkan ORGANDA sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya.

#### **b. Struktur Organisasi ORGANDA**

Struktur Organisasi ORGANDA terdiri dari atas :

- 1) Ditingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA (DPP ORGANDA), yang dipilih oleh Musyawarah Nasional. DPP juga dapat membentuk Koordinator Wilayah (KORWIL);
- 2) Ditingkat Provinsi disebut sebagai Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA (DPD ORGANDA) disertai nama Provinsinya. DPD dipilih oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 3) Ditingkat Kota/Kabupaten disebut Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA (DPC ORGANDA) disertai nama Kota/ Kabupaten.

DPC dipilih oleh Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah;

- 4) Pada Provinsi yang memiliki kekhususan, struktur organisasi setingkat Kota / Kabupaten diprovinsi disebut Dewan Pimpinan Unit (DPU) disertai dengan nama moda angkutannya masing – masing, yang dipilih oleh Musyawarah Unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah;
- 5) Pada Provinsi yang memiliki territorial / otorita dengan pengelolaan khusus, struktur organisasi setingkat Kota / Kabupaten diprovinsi disebut Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus) disertai dengan nama wilayah, yang dipilih oleh Musyawarah Cabang Khusus dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

#### c. Struktur DPP ORGANDA

##### **Dewan Pembina**

- 1) Pembina Umum : Menteri Dalam Negeri RI;
- 2) Pembina Teknis : Menteri Perhubungan RI dan KAPOLRI;
- 3) Pembina Teknis Harian : Direktur Jenderal (DIRJEN) Perhubungan Darat Kemenhub.

##### **Dewan Pertimbangan**

- 1) Ketua : DR. Ir. Bambang Susantono, MSCE.MCP;
- 2) Wakil Ketua : NONI S.A. Purnomo, B.Eng.MBA;
- 3) Anggota : Drs. Suroyo Alimoeso;
- 4) Anggota : Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, MBA;



- 5) Anggota : Prof. DR. Ir. Sutanto Suhodho, M.Eng;
- 6) Anggota : Prof. DR. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc;
- 7) Anggota : H. Ade Ruhyana Mahpud;
- 8) Anggota : Felix Jos Pullu, SH;
- 9) Anggota : Drs. H.B.Mustafa;
- 10) Anggota : H. Iskar Ismail;
- 11) Anggota : H.M. Nasir SH;
- 12) Anggota : Drs. Darmawan Tas'an, SH.MH;
- 13) Anggota : H. Ambo Dalle.

#### **Dewan Pengurus**

- 1) Ketua Umum : Adrianto Djokosoetono, ST.MBA;
- 2) Ketua : Lesani Adnan;
- 3) Ketua : Ivan Kamajaya;
- 4) Ketua : Firmansyah Mustafa, SE;
- 5) Ketua : Teddy Kurniawan Rusly, Dipl.W-ING;
- 6) Ketua : David Santoso;
- 7) Ketua : Tutik Kusuma Wardhani, SE.MM.M.Kes;
- 8) Sekretaris Jenderal : Ir. Ateng Aryono, MBA;
- 9) Wakil Sekretaris Jenderal : Maurid Siburian, SE.MH;
- 10) Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Syamsuddin Baco, SH.MM;
- 11) Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Jonggir H. Sitorus;
- 12) Bendahara : Ir. Agus Sulistiyono.

#### **Ketua Departemen**

- 1) Ketua Departemen Moda Angkutan Penumpang : Drs. Priyatmedi;
- 2) Ketua Departemen Moda Angkutan Darat : Hally Hanafiah;

- 3) Ketua Departemen Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan : Adi Prasetyo, SH;
- 4) Ketua Departemen Ekonomi dan Perbankan : H. Arifin Ashari;
- 5) Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah : Jan Joseph Ratulangi;
- 6) Ketua Departemen Pembinaan Perusahaan dan Koperasi : Herni Herdiani;
- 7) Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga & Kerjasama Internasional : Syaiful, SE dan H. Murdiawan Wirjohardjo;
- 8) Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) : Ir. Tedjo Kusumo, Msc;
- 9) Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan : Berman Limbong, SH.MH.

**d. Struktur DPD ORGANDA Jawa Timur**

Ketua DPD ORGANDA Provinsi Jawa Timur bernama Drs. H.B. Mustafa yang beralamat di Jl. Joyoboyo No. 26, Surabaya.

**e. Struktur DPC ORGANDA Kota Malang**

Ketua DPC ORGANDA Kota Malang bernama Rudi Haryanto Soesanto yang merupakan pemilik sekaligus Direktur Utama PT. Citra Perdana Kendedes.

**B. Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang Di Azka Buana Harta (ABH) Travel**

ABH Travel merupakan angkutan orang dan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum, dimana ketentuannya diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). UULLAJ dibentuk sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan menggantikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat ini, termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan daerah dan pusat.

Kegiatan pelaksanaan angkutan jalan tersebut tidak terlepas dari unsur pengangkut dan penumpang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah ‘pengangkut’ adalah “(1) orang yang mengangkut, (2) alat (kapal, mobil, dsb) untuk mengangkut.”<sup>76</sup> Pengertian nomor (1) secara terminologi berarti pihak penyelenggara pengangkutan, sedangkan pengertian nomor (2) berarti sebagai sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama termasuk dalam subjek pengangkutan, sedangkan pengangkut dalam arti yang kedua termasuk dalam objek pengangkutan. Penyelenggaraan pengangkutan adalah proses kegiatan pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.<sup>77</sup>

Pengangkut sebagai pihak penyelenggara pengangkutan bertujuan untuk membantu memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan orang dan/atau barang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau jumlah yang

<sup>76</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan**, badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/, Diakses tanggal 1 Maret 2015.

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.93.

banyak, begitu pula dikatakan efisien karena perpindahan tersebut menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh. Pengangkut memiliki arti yang luas yaitu tidak hanya terbatas atau dipertanggung jawabkan kepada crew saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang melaksanakan angkutan penumpang atau barang. Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima dan menjaga keselamatan barang muatan tersebut. Berangkat dari pengertian tersebut pengangkutan dapat dilakukan sendiri oleh pihak pengangkut, atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengangkut. Dalam hal ini, pihak pengangkut sebagaimana pengertian di atas dalam keberlakuannya bukan hanya dilakukan oleh orang semata, namun badan usaha yang memiliki wewenang mengadakan perjanjian pengangkutan, berhak menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang, dimana pihak pengangkut ini diwajibkan untuk memikul beban resiko tentang keselamatan penumpang dan atau barang-barang yang diangkut serta bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diderita dalam kegiatan pengangkutan tersebut.<sup>78</sup>

Secara umum, dalam pengangkutan orang dan/atau barang di darat, laut maupun udara dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta nasional, koperasi, dan perorangan warga negara Indonesia.<sup>79</sup> Dalam keberlakuannya pihak-pihak yang bertindak sebagai pengangkut sebagaimana dimaksud di atas lumrahnya

---

<sup>78</sup> Made Puri Adnyani Sangging, **Hukum Pengangkutan**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 1984, hlm.5.

<sup>79</sup> Sution Usman Adji, *op.cit*, hlm.86.

berbentuk badan usaha seperti: (Perusahaan Persekutuan badan hukum, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Persekutuan bukan badan hukum dan Perusahaan Perseorangan, “sangat sedikit pengangkut yang diselenggarakan oleh orang perseorangan bukan badan usaha. Hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum bagi keberlangsungan kegiatan usaha pengangkutan tersebut.”<sup>80</sup> Pasal 36 KM No.35 Tahun 2003 jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 ditegaskan untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
2. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri pemohon secara perorangan;
3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
4. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
6. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pengangkut yang tidak memiliki perusahaan pengangkutan, tetapi menyelenggarakan pengangkutan, hanya menjalankan pekerjaan

---

<sup>80</sup> Sution Usman Adji, *op.cit*, hlm.89.

pengangkutan. Pengangkut yang menjalankan pekerjaan pengangkutan hanya terdapat pada pengangkutan darat melalui jalan raya. Ia tidak diwajibkan mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan, tetapi harus memperoleh izin operasi (izin trayek). Dilihat dari makna syarat yang dimaksudkan di atas supaya pengangkut atau pihak penyelenggara pengangkutan mampu untuk melancarkan pengangkutan umum dengan teratur dan aman bagi penumpang dan/atau barang angkutan. Dalam hal ini ABH Travel bertindak sebagai pengangkut yang menyediakan jasa angkutan jalan berupa transportasi antar kota dalam bentuk travel dengan trayek Kota Malang, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo kepada masyarakat, dimana masyarakat (khususnya yang ingin melakukan perjalanan antar Kota Malang, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo) dalam hal ini bertindak sebagai seorang penumpang.

Penumpang angkutan umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana yang dimaksud bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal laut, ataupun pesawat terbang tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam alat pengangkutan, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Penumpang (passanger) adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Ada beberapa ciri penumpang orang yang berstatus pihak dalam



perjanjian pengangkutan, membayar biaya angkutan dan pemegang dokumen angkutan.<sup>81</sup>

Menurut Yoeti pengertian penumpang adalah pembeli produk dan jasa pada suatu perusahaan adalah pelanggan perusahaan barang dan jasa mereka dapat berupa seseorang (individu) dan dapat pula sebagai suatu perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2009 yang dimaksud penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut, penumpang angkutan umum dapat di maknai seseorang (individu) dan/atau satu (kelompok) yang menggunakan alat transportasi umum untuk suatu perjalanan tertentu yang didasari atas suatu perjanjian sebelumnya, dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut penumpang tersebut dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan tersebut.

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.51.



bangsa.<sup>82</sup> Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait aspek keselamatan tersebut, dalam Pasal 166 ayat (1) UULLAJ dijelaskan bahwa “angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.” Dokumen angkutan orang tersebut meliputi tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek, tanda pengenal bagasi, dan manifest.<sup>83</sup> Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang.<sup>84</sup> Tiket Penumpang adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan, dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.<sup>85</sup>

Perusahaan angkutan umum orang wajib menyerahkan tiket penumpang, menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek, menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang, dan menyerahkan manifest kepada Pengemudi.<sup>86</sup> Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket

---

<sup>82</sup> Krisnadi Nasution, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum**, Jurnal Ilmu Hukum, 2012, Vol. 8, No. 16.

<sup>83</sup> Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>84</sup> Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>85</sup> Pasal 166 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>86</sup> Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.<sup>87</sup> Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.<sup>88</sup> Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.<sup>89</sup>

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.<sup>90</sup> Mengacu pada kedua pasal di atas, apabila pengemudi mobil travel (sebagai orang yang dipekerjakan oleh pemilik/pengelola mobil travel) dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik/pengelola mobil travel tersebut ikut bertanggung jawab. Jadi, apabila kecelakaan mobil travel yang menelan korban jiwa tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pengemudi, perilaku penumpang sendiri, dan/atau gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan, maka si pemilik/pengelola mobil travel tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tiket penumpang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 166 ayat (2) UULLAJ sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait ganti rugi (asuransi) terhadap kerugian yang dialami oleh pihak penumpang karena kesalahan dari pihak pengangkut.

---

<sup>87</sup> Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>88</sup> Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>89</sup> Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>90</sup> Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam suatu kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu terkait dengan pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur. Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruh, akibat, dan kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila:

3. Telah mencapai pada suatu tujuan tertentu yang dikehendaki, terutama pada pembentukan hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
4. Hukum dapat dikatakan efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakai dan/atau diharapkan oleh hukum itu sendiri.

Efektif adalah keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya efek atau akibat yang dikehendakai seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendakinya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat hukum atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.<sup>91</sup> efektivitas adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>92</sup> Sosiologis

<sup>91</sup> Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 24.

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

berarti bahwa hukum itu benar adanya berlaku secara nyata dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat sedangkan filosofis berarti bahwa hukum berlaku sebagaimana dicita-citakan dan/atau dikehendaki oleh adanya suatu peraturan-peraturan sebagai nilai positif yang tertinggi. Sedangkan secara yuridis, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya itu sendiri. efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum terkait tiket penumpang dalam ABH Travel ini sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu penegak hukum adalah organisasi angkutan darat (ORGANDA) Kota Malang, ketentuan mengenai tiket penumpang, dan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat suatu kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitas tersebut.

Tiket Penumpang adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan; dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.<sup>93</sup> Tiket penumpang wajib diserahkan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang.<sup>94</sup> Tiket Penumpang

---

<sup>93</sup> Pasal 166 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>94</sup> Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tertentu mengenai tiket penumpang yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertindak sebagai penyedia layanan transportasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UULLAJ. Ketentuan mengenai tiket penumpang tersebut bertujuan untuk memberikan suatu standart tertentu terhadap tiket penumpang, yang pada dasarnya tiket penumpang tersebut mengandung asuransi yang dapat dilakukan klaim apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak penumpang yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut.

Pihak pengangkut yang dimaksud dalam hal ini adalah, pihak yang melakukan dan menyediakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi. Pada kasus ini pihak pengangkut adalah ABH Travel yang termasuk dalam penyedia layanan pengangkutan orang yang melakukan pengangkutan (transportasi) yang melayani trayek tetap antarkota.

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen angkutan orang tersebut meliputi tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek, tanda

---

<sup>95</sup> Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengenal bagasi, dan manifest.<sup>96</sup> Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang.<sup>97</sup> Dalam hal ini, ABH Travel termasuk dalam angkutan orang sehingga wajib menyediakan dokumen termasuk tiket penumpang yang memenuhi ketentuan standart tiket penumpang sebagaimana dijelaskan diatas. Pada kenyataannya, tiket penumpang yang diberikan oleh ABH Travel masih belum memenuhi ketentuan standart yang ditentukan dalam UULLAJ. Dalam tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel hanya termuat informasi mengenai nama penumpang, alamat penjemputan, alamat tujuan, waktu pemberangkatan, harga tiket, keberlakuan tiket, *charge area*, dan total pembayaran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 166 ayat (1) UULLAJ masih belum dapat diterapkan dengan baik oleh ABH Travel.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap pemilik ABH Travel menyatakan bahwa pihak ABH Travel memang tidak mencantumkan data yang lain dalam tiket penumpang, namun tetap mencatatnya dalam data base yang disimpan dalam computer server pada kantor pusat ABH di Malang dan di Madiun tergantung tempat keberangkatan

---

<sup>96</sup> Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>97</sup> Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



penumpang. Pihak ABH Travel juga mencatatkan data tersebut dalam buku agenda yang telah disediakan khusus untuk kepentingan tersebut.<sup>98</sup>

Pencatatan tersebut dimaksudkan agar terdapat kepastian terhadap data dan jati diri penumpang ABH Travel secara perseorangan secara tepat dan akurat guna memberikan laporan pertanggungjawaban serta evaluasi kerja setiap akhir bulan.<sup>99</sup> Selain itu, menurut pihak ABH Travel walaupun tiket yang dikeluarkan oleh ABH Travel masih belum memenuhi standart tiket penumpang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (1) UULLAJ namun terhadap tiket penumpang yang dikeluarkan oleh ABH Travel tersebut tetap dapat dilakukan klaim asuransi terhadap tiket penumpang tersebut apabila terjadi kerugian terhadap penumpang yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam hal ini adalah ABH Travel. Prosedur klaim asuransi tersebut adalah sama dengan prosedur klaim asuransi pada umumnya, namun klaim asuransi terhadap tiket penumpang yang dikeluarkan oleh ABH Travel ini tidak dilakukan secara langsung oleh pihak penumpang kepada pihak pemberi asuransi namun dilakukan oleh pihak ABH Travel dimana hasil dari klaim tersebut akan diserahkan oleh ABH Travel kepada Pihak Penumpang.<sup>100</sup> Hal tersebut dikarenakan walaupun klaim tersebut ditujukan kepada penumpang akan tetapi pihak yang mengajukan asuransi tersebut adalah ABH Travel sehingga klaim asuransi juga harus dilakukan oleh ABH Travel, lalu kemudian diserahkan kepada

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara terhadap Pemilik Azka Buana Harta Travel, pada tanggal 1 April 2018, pukul 12.25 WIB.

<sup>99</sup> Hasil wawancara terhadap Pemilik Azka Buana Harta Travel, pada tanggal 1 April 2018, pukul 12.25 WIB.

<sup>100</sup> Hasil wawancara terhadap Pemilik Azka Buana Harta Travel, pada tanggal 1 April 2018, pukul 12.25 WIB.



Pihak Penumpang. Prosedur klaim asuransi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Pihak Penumpang yang merasa mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak ABH Travel harus menyerahkan tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel sebagai bukti hak untuk melakukan klaim asuransi serta identitas dan data diri penumpang kepada pihak ABH Travel;
- ii. ABH Travel sebagai pengaju klaim asuransi harus menginformasikan kepada perusahaan asuransi bahwa tertanggung asuransi telah mengalami kerugian. Persiapkan salinan berkas-berkas dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak ABH Travel, yang berisikan data kapan, dimana, dan penyebab kerugian tertanggung asuransi. Biasanya perusahaan asuransi akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tertanggung, misalnya nomor polis asuransi, status polis asuransi tertanggung, dan informasi-informasi lain terkait kematian tertanggung;
- iii. Setelah itu, perusahaan asuransi akan mengirimkan formulir klaim asuransi akibat risiko kerugian tersebut. Isi dengan lengkap formulir klaim asuransi tersebut;
- iv. Setelah pihak ABH Travel mengisi dengan lengkap formulir klaim asuransi jiwa, dengan menyertakan berkas-berkas pendukungnya dengan lengkap, diantaranya:

- a. Polis dan Endorsement (asli);
- b. Fotokopi KTP atau identitas diri dari penerima manfaat;
- c. Berkas-berkas lengkap yang membuktikan adanya kerugian pihak Penumpang. Dan Surat Keterangan meninggal dari Dokter/Rumah Sakit, yang berisikan penyebab dari kematian tertanggung apabila meninggal dunia;
- d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pemerintah setempat (apabila meninggal dunia);
- e. Surat keterangan kepolisian (BAP) asli jika tertanggung (apabila meninggal dunia karena kecelakaan).
- v. Jika pihak ABH Travel sudah melengkapi berkas-berkas di atas, perusahaan asuransi akan segera menganalisis dan memproses klaim asuransi tersebut. Proses analisis klaim asuransi berupa verifikasi mengenai status polis asuransi apakah masih aktif, kemudian data diri terkait tertanggung, informasi seputar kematian tertanggung, dan verifikasi bukti-bukti adanya kerugian atau kematian tertanggung (dalam hal ini penumpang) apakah benar atau tidak. Dan juga syarat dan pengecualian pengajuan klaim asuransi terkait penyebab kematian tertanggung;
- vi. Apabila klaim asuransi tersebut dinilai sah dan benar adanya maka perusahaan akan melakukan perhitungan kewajiban yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada penerima manfaat yang telah ditunjuk oleh tertanggung sebelumnya;

- vii. Prosedur akhir dari pengajuan klaim asuransi tersebut adalah pembayaran klaim asuransi. Sebaiknya Anda menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan asuransi mengenai informasi rekening bank Anda. Proses klaim asuransi terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi sangat berhati-hati dan teliti saat menganalisa klaim asuransi (terkait kerugian penumpang), terlebih jika klaim asuransi mencapai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
- viii. Penyerahan hasil klaim asuransi tersebut dari Pihak ABH Travel kepada pihak Penumpang.

Tidak hanya dapat melakukan klaim asuransi terhadap kerugian yang diakibatkan karena kesalahan dari pihak pengangkut dalam hal ini ABH Travel, klaim asuransi tersebut tidak selamanya diterima oleh pihak pemberi asuransi. Sama seperti klaim asuransi pada umumnya, klaim asuransi terhadap kerugian penumpang yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pihak ABH Travel juga dapat ditolak oleh pihak pemberi asuransi. Untuk memberikan penolakan terhadap klaim asuransi oleh ABH Travel atas kerugian yang dialami oleh penumpang pemegang tiket penumpang akibat kesalahan pihak ABH Travel, penolakan tersebut dapat dilakukan karena alasan-alasan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, di dalam jangka waktu beberapa

tahun sejak tanggal berlakunya polis asuransi tersebut. Tetapi setelah beberapa tahun yang tertera di dalam polis atau kontrak perjanjian, maka perusahaan asuransi wajib untuk membayarkan klaimnya, bahkan karena alasan bunuh diri sekalipun (apabila pihak Penumpang meninggal);

2. Perusahaan berhak menolak atau membatalkan klaim apabila nasabah terbukti telah memberikan informasi yang salah pada saat mengisi formulir pengajuan asuransi jiwa. Ada ketidaksesuaian antara data yang diberikan oleh nasabah dengan kenyataan yang ada, atau dengan kata lain nasabah berbohong atau memalsukan soal informasi atau data yang diberikan saat pengajuan;
3. Tertanggung (penumpang) meninggal dunia akibat dari tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi tersebut, biasanya penerima manfaat atau *beneficiary owner*.

Berdasarkan teori efektifitas sebagaimana dijelaskan diatas, dapat kita ketahui bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu penerapan dan penegakan aturan-aturan hukum dalam suatu wilayah tertentu (dalam hal ini adalah wilayah kerja ABH Travel, lebih tepatnya di Malang, Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo) sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu penegak hukum adalah organisasi angkatan darat (ORGANDA) Kota Malang, ketentuan mengenai tiket penumpang, dan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana

peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan.<sup>101</sup> Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih terperinci dengan uraian yang akan diberikan oleh Penulis sebagai berikut:

#### 1. Penegak Hukum (ORGANDA Kota Malang)

Penegak hukum, dalam penelitian ini yang dimaksud penegak hukum adalah organisasi angkatan darat (ORGANDA) Kota Malang. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap pemilik ABH Travel yang pada dasarnya menyatakan bahwa ABH Travel merupakan penyedia jasa transportasi yang menjalankan kegiatannya secara resmi, dan telah tercatat pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2007 (dua ribu tujuh). Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ABH Travel tersebut juga telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pendaftaran yang telah diatur sebelumnya. Pihak ABH Travel juga telah secara rutin membayar pajak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh penyedia jasa transportasi resmi yang beroperasi di wilayah Indonesia khususnya Jawa Timur.

ORGANDA Kota Malang berdasarkan anggaran dasarnya memiliki tujuan “untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang kuat, efisien dan berdaya saing tinggi.” ORGANDA Kota Malang memiliki tugas dan fungsi “(1) memupuk dan meningkatkan

---

<sup>101</sup> Yakub Adi Kristanto, *op.cit*, hlm. 47.

kesadaran Nasional serta patriotisme para Anggota dalam tanggung jawabnya sebagai Warga Negara, (2) memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan serta mempertinggi derajat para Anggota dan berusaha menempatkannya pada kedudukan yang selaras dengan fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) memperjuangkan iklim yang baik dan sehat dibidang usaha angkutan jalan, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota, dalam rangka memanfaatkan modal dan keahlian secara optimal dan efisien, dan (4) membina dan mengembangkan peran serta para Anggota dalam kegiatan ORGANDA."

Berdasarkan anggaran dasar tersebut dapat kita lihat bahwa Organda Kota Malang memiliki tujuan, tugas dan fungsi yaitu membina dan mengembangkan kemampuan dan profesionalisme anggota dalam memberikan peran serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan organda. Dengan demikian, ORGANDA berhak untuk memberikan pembinaan terhadap ABH Travel yang merupakan anggota Organda dalam menjalankan kegiatannya yang berkaitan dengan organda, dalam hal ini adalah penyediaan tiket penumpang oleh ABH Travel yang tidak sesuai dengan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ.

Namun dalam hal ini, organisasi angkutan darat (ORGANDA) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya pengecekan terhadap kelengkapan yang

seharusnya disediakan oleh ABH Travel dalam menjalankan pekerjaannya selama ini. Padahal secara nyata ABH Travel tidak menyediakan tiket yang sesuai dengan standart tiket yang diatur dalam UULLAJ yang kedepannya dapat menimbulkan kerugian kepada pihak Penumpang.

Penjelasan Penulis tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala ORGANDA Kota Malang yang menyatakan bahwa pembinaan oleh ORGANDA terhadap pengusaha travel di Kota Malang selama ini sebagian besar hanya dilakukan sebagai bentuk kerjasama organda dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dalam melakukan razia travel gelap dengan harapan kedepannya tidak ada pengusaha travel yang menjalankan kegiatan tanpa ijin (illegal) sehingga dapat merugikan masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang.<sup>102</sup> “Kedepannya saya berharap agar seluruh pengusaha travel yang beroperasi di Kota Malang dapat menjalankan kegiatannya dengan ijin yang jelas.” Namun pihaknya tidak memungkiri atas minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap travel yang telah memperoleh ijin beroperasi secara legal, sehingga ORGANDA Kota Malang belum melakukan teguran ataupun pembinaan lebih lanjut terhadap travel yang tidak memenuhi ketentuan UULLAJ. Tambahnya “pihak ORGANDA Kota Malang selama ini hanya melakukan pembinaan pada saat memberikan ijin untuk

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Rudy Sosesanto selaku Kepala ORGANDA Kota Malang, pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.15 WIB.



beroperasi terhadap travel yang menjalankan kegiatan di Kota Malang.”<sup>103</sup>

## 2. Ketentuan Mengenai Tiket Penumpang

Ketentuan Pasal 166 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) berkedudukan sebagai substansi hukum atau aturan hukum Dalam hal ini ketentuan mengenai tiket penumpang telah diatur dalam Pasal 166 Ayat (1) UULLAJ. Penjelasan Pasal 166 Ayat (2) Huruf a UULLAJ menjelaskan bahwa Tiket Penumpang adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan, dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Sehingga tiket penumpang travel yang berkedudukan sebagai angkutan umum haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ.

## 3. Hukum yang Hidup yang dianut dalam Suatu Masyarakat

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Rudy Sosesanto selaku Kepala ORGANDA Kota Malang, pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.15 WIB.

Hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan merupakan cerminan dari budaya hukum. Apabila terdapat suatu kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitas tersebut.

Dalam hal ini, pihak ABH Travel sebagai salah satu bagian dari budaya masyarakat tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dengan baik, hal tersebut didasarkan atas kekurangpahaman mereka dalam mengartikan ketentuan dalam pasal tersebut. Mereka menilai bahwa informasi tersebut sudah cukup apabila disimpan dan diarsipkan dengan baik dalam data base dan komputer server dari ABH Travel sendiri. Disisi lain, pihak penumpang juga tidak pernah melakukan protes terhadap ketidak lengkapan dokumen tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel yang kedepannya dapat memberikan kerugian kepada mereka, yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh ABH Travel. Karena ketidak lengkapan dokumen tiket penumpang yang disediakan oleh pihak ABH Travel tersebut dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya klaim asuransi oleh ABH Travel atas kerugian yang diperoleh oleh penumpang atas kesalahan yang dilakukan ABH Travel.

Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Bapak Adibya dan Ibu Andini sebagai 2 (dua) dari keseluruhan masyarakat sebagai penumpang ABH Travel yang Penulis ketahui pernah mengajukan ganti kerugian atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak ABH Travel. Menurut Bapak Adibya dia tidak pernah melakukan protes terhadap pihak ABH Travel terkait tiket penumpang yang disediakan, hal tersebut dikarenakan dia tidak mengetahui bahwa terdapat ketentuan standar tertentu yang harus dipenuhi dalam tiket penumpang.<sup>104</sup> Terkait kerugian yang dialaminya akibat kesalahan pihak ABH Travel, Bapak Adibya menjelaskan bahwa “kejadian terjadi sekitar tahun 2011 (dua ribu sebelas) pada saat perjalanan dari Madiun menuju Malang, travel berhenti sementara di rumah makan dan supir mempersilahkan penumpang untuk makan, setelah selesai makan saya pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi saya terkejut karena mobil sudah akan berjalan lalu saya tergesa-gesa menuju mobil, tiba-tiba mobil mundur dan menabrak saya kaki kiri saya terlindas ban mobil dan saya mengalami keretakan pada kaki kiri saya. Supir ABH Travel mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saya dia mengatakan bahwa dia tidak melihat saya yang berada di belakang dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Adibya, pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 10.15 WIB.

terhadap penumpang yang belum lengkap.”<sup>105</sup> Kemudian untuk proses ganti kerugian kepada Bapak Adibya, pihak ABH Travel menarik tiket penumpang atas nama Bapak Adibya dan meminta KTP dari Bapak Adibya untuk di foto kopi, setelah sekitar 14 (empat belas) hari berselang uang ganti kerugian dari ABH Travel diserahkan kepada Bapak Adibya dan istri dari Bapak Adibya diminta tanda-tangan sebagai tanda bukti diterimanya uang ganti kerugian tersebut.<sup>106</sup>

Sedangkan Ibu Andini dalam wawancara dengan Penulis membenarkan bahwa tiket penumpang yang diberikan oleh ABH Travel hanya memuat informasi mengenai nama penumpang, alamat penjemputan, alamat tujuan, waktu pemberangkatan, harga tiket, keberlakuan tiket, *charge area*, dan total pembayaran. Namun Ibu Andini tidak pernah melakukan protes dikarenakan tidak mengetahui ketentuan dari standar tiket penumpang dan akibat dari tiket penumpang yang tidak sesuai standar. Terkait dengan kerugian yang diperoleh Ibu Andini akibat kesalahan dari pihak ABH Travel, Ibu Andini menjelaskan bahwa “kejadian terjadi sekitar tahun 2015, dimana pada waktu itu saya sedang melakukan perjalanan ke Malang dari Ngawi dengan menggunakan ABH Travel untuk menjalani *meeting* dengan rekan kerjanya di Malang. Namun pada saat perjalanan mobil berhenti untun mengisi bensin (bahan bakar) kemudian saya turun untuk

<sup>105</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Adibya, pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 10.15 WIB.

<sup>106</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Adibya, pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 10.15 WIB.

buang air kecil di kamar mandi, kemudian setelah saya keluar dari kamar mandi mobil sudah bersiap untuk berangkat dengan keadaan mesin sudah dinyalakan, saya bergegas naik ke mobil namun sebelum saya naik dengan sempurna supir sudah menjalankan mobil dan mengakibatkan kaki saya terseret dan mengalami luka yang cukup dalam.”<sup>107</sup> Setelah sampai di Kantor ABH Travel Ibu Andini meminta ganti rugi untuk pengobatan luka yang dia alami karena dia menilai bahwa supir telah lalai dalam memeriksa kesiapan penumpang dan terburu-buru dalam menjalankan mobil. Kemudian pihak ABH Travel meminta maaf dan berjanji untuk memberikan ganti kerugian kepada Ibu Andini.<sup>108</sup> Ibu Andini menjelaskan “pihak ABH Travel meminta tiket penumpang dari saya sebagai prosedur dilakukannya ganti kerugian dan sekitar 14 (empat belas) hari saya mendapat uang ganti rugi tersebut”.<sup>109</sup>

Melihat hasil wawancara dengan Bapak Adibya dan Ibu Andini tersebut menjelaskan bahwa tiket penumpang ABH Travel hanya memuat informasi mengenai nama penumpang, alamat penjemputan, alamat tujuan, waktu pemberangkatan, harga tiket, keberlakuan tiket, *charge area*, dan total pembayaran. Sehingga tiket penumpang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara terhadap Ibu Andini, pada tanggal 11 Agustus 2018, pukul 16.45 WIB.

<sup>108</sup> Hasil wawancara terhadap Ibu Andini, pada tanggal 11 Agustus 2018, pukul 16.45 WIB.

<sup>109</sup> Hasil wawancara terhadap Ibu Andini, pada tanggal 11 Agustus 2018, pukul 16.45 WIB.

UULLAJ. Namun mereka tidak melakukan protes dikarenakan tidak mengetahui tentang standar tiket penumpang dan akibat dari tiket penumpang yang tidak sesuai standar. Penumpang yang mengalami kerugian mendapat ganti kerugian dari pihak ABH Travel namun pihak penumpang yang dirugikan tidak mengetahui tentang bagaimana proses klaim asuransi dan hanya mengetahui bahwa mereka mendapatkan ganti kerugian setelah 14 (empat belas) hari setelah proses pengajuan ganti kerugian. Sehingga tidak diketahui apakah klaim asuransi dengan menggunakan tiket penumpang yang tidak sesuai standar tersebut dapat berhasil dilakukan atau tidak. Namun dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan syarat pengajuan ganti kerugian dimana untuk ganti rugi kepada Bapak Adibya pihak ABH Travel meminta tiket penumpang dan foto kopi KTP keduanya atas nama bapak Adibya kemudian untuk ganti rugi dari Ibu Andini pihak ABH Travel hanya meminta tiket penumpang atas nama Ibu Andini saja.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah Penulis jelaskan diatas, dari 3 (tiga) faktor utama efektifitas suatu peraturan, dapat kita ketahui bahwa hanya ada 1 (satu) faktor saja yang telah terpenuhi dengan baik, yaitu faktor Pasal 166 Ayat (1) UULLAJ sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang tiket penumpang angkutan jalan, karena tidak hanya ada ketentuan mengenai kewajiban memberikan tiket penumpang, namun dalam penjelasan Pasal 166 ayat (2) UULLAJ juga memuat tentang standart tiket yang harus disediakan oleh penyedia layanan pengangkutan orang, termasuk ABH



Travel, yaitu memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan, dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ.

Namun, 2 (dua) faktor utama yang lain sama sekali tidak terpenuhi dengan baik, yaitu yang pertama adalah faktor penegak hukum dalam hal ini adalah ORGANDA Kota Malang dan yang kedua adalah faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam faktor penegak hukum dapat kita ketahui bahwa organisasi angkutan darat (ORGANDA) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel dalam menjalankan pekerjaannya selama ini. Padahal secara nyata ABH Travel tidak menyediakan tiket yang sesuai dengan standart tiket yang diatur dalam UULLAJ yang kedepannya dapat menimbulkan kerugian kepada pihak Penumpang.

Sedangkan dalam faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat dapat kita ketahui bahwa pihak ABH Travel sebagai salah satu bagian dari budaya masyarakat tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dengan baik, hal tersebut didasarkan atas kekurangpahaman mereka dalam mengartikan ketentuan dalam pasal tersebut. Mereka menilai bahwa informasi tersebut sudah cukup apabila disimpan dan diarsipkan dengan baik dalam data base dan komputer server dari ABH Travel sendiri. Disisi lain, pihak penumpang juga tidak pernah



melakukan protes terhadap ketidak lengkapan dokumen tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel yang kedepannya dapat memberikan kerugian kepada mereka, yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh ABH Travel.

Pendapat Penulis tersebut dibenarkan oleh Kepala Jasa Raharja Kota Malang Bapak Zul Efendi yang menyatakan bahwa “kecelakaan maupun kejadian lain yang menimbulkan kerugian kepada penumpang dalam kegiatan transportasi menjadi hal yang sangat dihindari namun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh sebab itu kami bekerja sama dengan sebagian besar penyedia jasa transportasi baik darat, air maupun udara dalam menyediakan asuransi dengan tiket penumpang sebagai dasar melakukan klaim asuransi.”<sup>110</sup> Namun dirinya sangat menyayangkan bahwa masih banyak penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa tersebut yang masih belum melek hukum, sehingga penyedia jasa transportasi (dalam hal ini travel) masih banyak yang tidak menyediakan kelengkapan sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Sebagai contoh adalah tiket penumpang, Bapak Zul Efendi mengatakan bahwa tidak hanya ABH Travel akan tetapi hamper keseluruhan travel yang beroperasi di Kota Malang dan pernah melakukan klaim asuransi di Jasaraharja Kota Malang masih belum memenuhi ketentuan tiket penumpang dalam UULLAJ. Sedangkan dari pihak penumpang yang berkedudukan sebagai korban yang mengalami kerugian disini masih banyak yang tidak mengajukan klaim asuransi dan hanya terkesan pasrah. Perlu diketahui penumpang berhak atas ganti kerugian yang wajib diberikan oleh

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Zul Efendi selaku Kepala Jasa Raharja Kota Malang, pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB.

pengangkut karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan, tambahannya.<sup>111</sup>

Pihak Jasa Raharja Kota Malang selama ini masih memberikan pengecualian dan sedikit keringanan terhadap pihak travel yang masih belum menyediakan tiket penumpang yang sesuai dengan seluruh ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ namun telah memenuhi sebagian besar komponen didalamnya agar tetap dapat mengajukan dan mengurus klaim asuransi untuk penumpangnya. Pihak Jasa Raharja Kota Malang mengizinkan klaim asuransi tersebut dengan terus memberikan pengarahan kepada pihak travel agar dapat menyediakan tiket penumpang yang sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Namun, Bapak Zul Efendi mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat bertindak tegas dengan tidak memperbolehkan pengajuan klaim asuransi oleh travel yang menyediakan tiket penumpang tidak sesuai dengan ketentuan UULLAJ.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ masih belum dapat dijalankan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor utama untuk menilai keefektifan suatu aturan hukum tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik, yaitu faktor penegak hukum dan faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat, dimana masing-masing dalam penelitian ini diwakili oleh ORGANDA Kota

<sup>111</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Zul Efendi selaku Kepala Jasa Raharja Kota Malang, pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB.

<sup>112</sup> Hasil wawancara terhadap Bapak Zul Efendi selaku Kepala Jasa Raharja Kota Malang, pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB.

Malang, ABH Travel, dan pihak Penumpang ABH Travel. Sedangkan faktor yang sudah terpenuhi adalah ketentuan mengenai tiket penumpang yang dalam hal ini adalah ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UULLAJ itu sendiri.

**C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dapat Berjalan Efektif**

Berikut ini Penulis akan menjelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh ABH Travel, ORGANDA Kota Malang, dan Jasa Raharja Kota Malang dalam menerapkan standar tiket penumpang dan upaya yang telah ABH Travel, ORGANDA Kota Malang, dan Jasa Raharja Kota Malang lakukan untuk mengatasi hambatan penerapan standar tiket penumpang tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Hambatan yang dialami ABH Travel**

Berikut ini adalah hambatan yang dialami oleh ABH Travel dalam menerapkan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ:

- a. Organisasi angkutan darat (ORGANDA) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel dalam

menjalankan pekerjaannya selama ini. Padahal secara nyata ABH Travel tidak menyediakan tiket yang sesuai dengan standart tiket yang diatur dalam UULLAJ yang kedepannya dapat menimbulkan kerugian kepada pihak Penumpang;

- b. Ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ menjelaskan bahwa Tiket Penumpang adalah dokumen yang memuat informasi paling sedikit nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan, nama Penumpang dan nama pengangkut, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan serta tujuan perjalanan, nomor pemberangkatan, dan pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UULLAJ;
- c. Adanya anggapan dari Pihak ABH Travel bahwa klaim asuransi akan tetap dapat dilakukan walaupun tiket penumpang yang disediakan tidak sesuai dengan standart Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ, dan tidak mengetahui bahwa tiket penumpang tersebut menjadi salah satu bukti yang menunjukkan identitas diri penumpang yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari pihak ABH Travel apabila ingin melakukan klaim asuransi tersebut;
- d. Adanya pemikiran bahwa tidak masalah tiket yang diberikan tidak sesuai karena tidak pernah terjadi kompalin dari pihak ORGANDA ataupun pihak penumpang maupun pihak lain yang merasa dirugikan akibat tiket yang dikeluarkan oleh ABH Travel tidak sesuai standart yang diatur dalam UULLAJ.

## 2. Hambatan yang dialami ORGANDA Kota Malang

Berikut ini adalah hambatan yang dialami oleh ORGANDA Kota Malang dalam menerapkan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ:

- a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh ORGANDA terhadap travel yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan di Kota Malang, sehingga Pihak ORGANDA tidak mengetahui dengan pasti bagaimana penyedia jasa transportasi travel menyediakan berkas-berkas termasuk tiket penumpang dan kesesuaian antara tiket penumpang yang disediakan tersebut dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ;
- b. Kurang tanggapnya penyedia jasa transportasi travel untuk mengganti tiket penumpang agar sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ. Hal tersebut dikarenakan penyedia jasa transportasi travel dalam menjalankan kegiatannya sangatlah berorientasi terhadap laba perusahaan yang diperolehnya. Penyedia jasa transportasi travel tidak mengganti tiket penumpang dengan tiket yang sesuai standar karena mencetak ulang tiket dapat mengurangi keuntungan yang mereka peroleh.

## 3. Hambatan yang dialami Jasa Raharja Kota Malang

Hambatan yang dialami oleh ORGANDA Kota Malang dalam menerapkan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ adalah banyak penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa tersebut yang masih belum melek hukum, sehingga penyedia jasa transportasi (dalam hal ini

travel) masih banyak yang tidak menyediakan kelengkapan sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Sebagai contoh adalah tiket penumpang. Tidak hanya ABH Travel akan tetapi hampir keseluruhan travel yang beroperasi di Kota Malang dan pernah melakukan klaim asuransi di Jasaraharja Kota Malang masih belum memenuhi ketentuan tiket penumpang dalam UULLAJ. Sedangkan dari pihak penumpang yang berkedudukan sebagai korban yang mengalami kerugian disini masih banyak yang tidak mengajukan klaim asuransi dan hanya terkesan pasrah.

#### **4. Upaya yang dilakukan oleh ABH Travel**

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh ABH Travel agar ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dapat berjalan efektif:

- a. Melakukan perbaikan terhadap tiket penumpang yang selama ini dikeluarkan oleh pihak ABH Travel agar sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak ORGANDA untuk melakukan perbaikan tiket penumpang, agar tidak terjadi kesalahan yang mungkin terjadi karena ketidak tahuan dari pihak ABH Travel;
- c. Memperbaiki tiket penumpang ABH Travel agar dapat diajukan sebagai bukti yang valid dalam proses klaim asuransi;
- d. Terus melayani penumpang dengan maksimal, terutama terkait tiket penumpang dan klaim asuransi kerugian pihak penumpang akibat



kesalahan pihak ABH Travel agar kedepannya tidak terjadi kompalin atau teguran baik dari pihak ORGANDA maupun penumpang.

#### **5. Upaya yang dilakukan oleh ORGANDA Kota Malang**

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh ORGANDA Kota Malang untuk mengupayakan agar ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dapat berjalan efektif:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap penyedia jasa transportasi travel di Kota Malang, dengan cara mengumpulkan pemilik usaha jasa transportasi travel di Kota Malang untuk memberi pembinaan hukum dan pentingnya pemenuhan komponen-komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyediaan jasa transportasi darat termasuk travel;
- b. Melakukan teguran terhadap pihak-pihak penyedia jasa transportasi darat termasuk travel yang masih belum memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ORGANDA Kota Malang juga akan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap penyedia jasa transportasi darat termasuk travel yang tidak mengindahkan 3 (tiga) kali peringatan yang telah diberikan oleh ORGANDA Kota Malang.

#### **6. Upaya yang dilakukan oleh Jasa Raharja Kota Malang**

Upaya yang dilakukan oleh Jasa Raharja Kota Malang agar ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dapat berjalan efektif adalah dengan memberikan arahan terhadap penyedia jasa travel agar



menyediakan tiket penumpang sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ dan memberikan peringatan apabila pihak penyedia jasa transportasi travel tetap tidak menyediakan tiket penumpang sesuai dengan ketentuan tersebut maka pihak Jasa Raharja Kota Malang tidak akan memberikan izin pihak penyedia jasa transportasi travel untuk mengajukan klaim asuransi atas nama penumpangnya yang tertera dalam tiket penumpang yang tidak sesuai standar tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Efektifitas Penerapan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ Terkait Tiket Penumpang di ABH Travel

Ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ masih belum dapat dijalankan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor utama untuk menilai keefektifan suatu aturan hukum tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik, yaitu faktor penegak hukum dan faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat, dimana masing-masing dalam penelitian ini diwakili oleh ORGANDA Kota Malang, ABH Travel, dan pihak Penumpang ABH Travel. Sedangkan faktor yang sudah terpenuhi adalah ketentuan mengenai tiket penumpang yang dalam hal ini adalah ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ.

##### 2. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan ABH Travel Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ Terkait Tiket Penumpang

Hambatan yang dialami ABH Travel dalam menerapkan tiket penumpang sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ adalah (1) Organisasi angkutan darat (organda) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya

pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel dalam menjalankan pekerjaannya. (2) ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ (3) adanya anggapan dari Pihak ABH Travel bahwa klaim asuransi akan tetap dapat dilakukan walaupun tiket penumpang yang disediakan tidak sesuai dengan standart Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ, serta (4) adanya pemikiran bahwa tidak masalah tiket yang diberikan tidak sesuai karena tidak pernah terjadi kompalin dari pihak organda ataupun pihak penumpang maupun pihak lain yang merasa dirugikan akibat tiket yang dikeluarkan oleh ABH Travel tidak sesuai standart yang diatur dalam UULLAJ. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel adalah (1) melakukan perbaikan terhadap tiket penumpang ABH Travel agar sesuai dengan ketentusn Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ, (2) melakukan koordinasi dengan pihak organda untuk melakukan perbaikan tiket penumpang, (3) memperbaiki tiket penumpang ABH Travel agar dapat diajukan sebagai bukti yang valid dalam proses klaim asuransi, dan (4) terus melayani penumpang dengan maksimal, terutama terkait tiket penumpang dan klaim asuransi kerugian pihak penumpang akibat kesalahan pihak ABH Travel.

Hambatan yang dialami ORGANDA Kota Malang adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh ORGANDA terhadap travel yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan di Kota Malang dan kurang tanggapnya penyedia jasa transportasi travel untuk mengganti

tiket penumpang agar sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh ORGANDA Kota Malang adalah melakukan sosialisasi terhadap penyedia jasa transportasi travel di Kota Malang dan melakukan teguran dan memberi sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak penyedia jasa transportasi darat termasuk travel yang masih belum memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hambatan yang dialami oleh Jasa Raharja Kota Malang adalah banyak penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa tersebut yang masih belum melek hukum, sehingga penyedia jasa transportasi (dalam hal ini travel) masih banyak yang tidak menyediakan kelengkapan sesuai dengan ketentuan UULLAJ. Sedangkan upayan yang dilakukan oleh Jasa Raharja Kota Malang adalah memberikan peringatan apabila pihak penyedia jasa transportasi travel tetap tidak menyediakan tiket penumpang sesuai dengan ketentuan tersebut maka pihak Jasa Raharja Kota Malang tidak akan memberikan izin pihak penyedia jasa transportasi travel untuk mengajukan klaim asuransi atas nama penumpangnya yang tertera dalam tiket penumpang yang tidak sesuai standar tersebut.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran yang diberikan oleh Penulis terhadap penumpang ABH Travel maupun pihak ABH Travel terkait standar tiket penumpang dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ. Saran ini diberikan

agar kedepannya tidak terjadi kerugian baik kerugian terhadap penumpang ABH Travel maupun pihak ABH Travel sebagai penyedia tiket penumpang. Saran yang Penulis berikan tersebut antara lain sebagai berikut:

### **1. Bagi Penumpang ABH Travel**

Penumpang ABH Travel dapat melakukan komplain terhadap tiket penumpang yang dikeluarkan oleh ABH Travel karena tiket penumpang ABH travel tersebut tidak memenuhi standart tiket penumpang yang terdapat dalam Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ. Karena tiket penumpang tersebut akan berpengaruh terhadap klaim asuransi yang akan diberikan oleh pihak penyedia asuransi apabila terjadi kerugian kepada penumpang yang disebabkan oleh pihak ABH Travel.

### **2. Bagi ABH Travel**

ABH Travel sebaiknya segera mengganti tiket penumpang yang dikeluarkan oleh pihak mereka sesuai dengan standart tiket penumpang yang ditentukan oleh Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a UULLAJ tanpa harus menunggu adanya terguran dari organda maupun komlain dari penumpang ABH Travel. Karena tiket penumpang tersebut dipergunakan sebagai bukti identitas pihak penumpang yang mengalami kerugian karena kesalahan pihak ABH Travel, dalam proses melakukan klaim asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973.
- Krisnadi Nasution, **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum**, Jurnal Ilmu Hukum, 2012, Vol. 8, No. 16.
- Made Puri Adnyani Sangging, **Hukum Pengangkutan**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 1984.
- Rustian Kamaluddin, **Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Penerbit Ramaji Karya, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 2005.
- Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. CV Alfabeta. Bandung. 2011.
- Suharsimi Arikunto. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**. Rienek Cipta. Jakarta. 2002.
- W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

### Perturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502).

### Internet

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2013-2018** (*online*), [http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F\\_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf](http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf), diakses pada tanggal 05 Mei 2017. (Jam 11.35 WIB).
- Harmoni Travel Agent, **Pengertian Travel** (*online*), [harmonitravel.com/pengertian-travel](http://harmonitravel.com/pengertian-travel), diakses pada tanggal 2 Januari 2018 (Jam 13.35 WIB).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan** (*online*), [badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/), Diakses tanggal 1 Maret 2015 (Jam 13.45 WIB).

Pemerintah Kota Malang, **Visi dan Misi** (*online*), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017 (Jam 12.35 WIB).

